

Visionist

Volume 11, Nomor 2 – September 2022

ANALISIS PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG	<i>Ketut A, Iskandar Ali Alam, Habiburahman, Hendri Dunan</i>	1-7
MANAJEMEN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SMPN 14 KOTABUMI LAMPUNG UTARA	<i>Meri Astuti, Karwono, Defrizal, Haninun</i>	8-14
PENGARUH TINGKAT LITERASI DIGITAL DAN KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG TURIS KE WISATA BAHARI LAMPUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19	<i>Rahmat, Tina M. B, Andala R. P. B, Tri Lestira Putri W</i>	15-25
STRATEGI PENJUALAN PRODUK FRUIT SALAD LAMPUNG BERBASIS <i>SOFT SYSTEM METHODOLOGY</i>	<i>Wenny P.S, M Yusuf S. Barusman, M. Oktavianur, Hepiana P</i>	26-36
PENGARUH KOMPETENSI INDIVIDU DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT PLN (PERSERO) MAGELANG	<i>Dian Marlina Verawati</i>	37-44
DAMPAK MUTASI DAN TRAINING TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	<i>Dita Oki Berliyanti</i>	45-51
PERAN KOMUNIKASI PEMASARAN DAN FORMAT SIARAN TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK MENJADI PENYIAR RADIO PRO 2 FM BANDUNG	<i>Marceilla Hidayat</i>	52-58
ANALISIS STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BUMD PARIWISATA (TAMAN KEHATI) DI KABUPATEN BANDUNG	<i>Nono Wibisono</i>	59-73
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BANTEN	<i>Sarfilianty Anggiani</i>	74-80
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KULINER “THE CRUNCHY” DI KARAWANG	<i>Yanti Tayo, Dinda Arabella</i>	81-91

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 11	Nomor 2	Halaman 1 – 91	Bandar Lampung September 2022	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	-----------	---------	-------------------	----------------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 11, Nomor 2 – September 2022

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Banten

Sarfilianty Anggiani¹

¹Universitas Trisakti

Corresponding e-mail: sarfilianty@trisakti.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas SDM, terapan dari akuntansi sistematis keuangan daerah, memanfaatkan teknologi informasi, dan sistem kendali faktor internal terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah kabupaten serang. Penelitian ini menggunakan 2 orang pegawai pengelola keuangan dikalikan 38 OPD sama dengan 76 orang pegawai yang di jadikan populasi sebagai sampel. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian populasi yang meneliti seluruh anggota populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas sumber daya manusia, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD, Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemerintahan Kabupaten Serang dan Kualitas Sumber daya manusia memiliki pengaruh positif atau menunjukkan positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan*

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berisikan Standar Akuntansi Pemerintahan memberi penjelasan tentang Laporan keuangan yang telah berhasil didapat melalui SAP, fokusnya adalah aktual berfungsi untuk memberikan manfaat yang baik untuk pemangku kepentingan yang ada, baik sebagai pengguna ataupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, berbanding dengan biaya yang telah keluar. Hal ini sejalan dengan sebuah prinsip akuntansi, yakni jika biaya keluar akan berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapatkan. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disebutkan dalam PP No. 8 Th 2006, membuat pernyataan yakni laporan keuangan merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam waktu 1 periode.

Menurut Miniawati (2012), akan lebih baik apabila manajemen perusahaan dalam pelaksanaan segala sesuatu akan menerapkan fungsi-fungsi dari manajemen. Seperti yang diketahui, elemen dari manajemen yakni, Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengarahan. Anggaran adalah satu dari beberapa bagian dari proses pengendalian manajemen yang isinya tentang bagaimana perencanaan dalam pekerjaan satu tahun dalam kuantitatif dan seperti biasa diukur dari satuan moneter, dan juga taksiran nilai sumber daya yang pelaksanaannya memerlukan rencana kerja. Sehingga, organisasi membutuhkan anggaran untuk mencapai tujuan jangka Panjang, pendek atau menengah (Nilwan, 2016), sejak berlakunya otonomi daerah sampai sekarang, yang mengelola keuangan daerah makin menunjukkan perkembangan positif, hal ini dapat diketahui karena semakin meningkatnya pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dari BPK RI, seperti yang diketahui bahwa WTP adalah bentuk akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban pemerintah daerah atau mengelola keuangan daerah yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya berlaku, cukup mengungkapkan, patuhan terhadap peraturan undang-undang dan efektifitas kendali faktor internal yang baik.

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Serang tahun 2016-2020

Tahun	Opini
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel perkembangan opini LKPD Kabupaten Serang tahun 2016 – 2020 diatas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016 – 2017 menunjukkan peningkatan kualitas, tetapi menurun pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP ini kembali diraih Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2020. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Serang sendiri juga memang selama tiga tahun (2016, 2017, dan 2020), mendapatkan sebuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun dengan beberapa catatan yang harus tertindaklanjuti.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil pemeriksaan Sistem pengendalian intern

No.	HASIL TEMUAN
1	Pengelolaan rekening bank pada 13 opd belum tertib
2	Pengelolaan persediaan bahan material pada dinas PUPR blm tertib
3	Pelaporan dan penatausahaan aset tetap pada pemerintahan kabupaten Serang belum tertib
4	Terdapat kesalahan penganggaran pada dua OPD dengan nilai Rp.4.011.900.000
5	Pengelolaan retribusi daerah pada dinas PUPR tidak sesuai ketentuan

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2, terdapat lima temuan. Temuan nomor satu terjadi dikarena masih kurangnya ketelitian dari para bendahara OPD terkait, dimana dalam hasil wawancara yang dilaksanakan BPK kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa ada rekening pasif atas nama OPD tempat mereka bekerja. Temuan nomor dua terjadi karena sisa nilai persediaan bahan material pada neraca saat dilakukan penghitungan ulang melalui uji petik bersama BPK pada awal tahun 2019 sama dengan saldo yang tercatat pada akhir tahun 2018 tanpa melakukan analisa yang memadai untuk meyakinkan data tersebut, material senilai Rp. 39.144.184.437 tersebut tidak akurat, penatausahaannya tidak tertib, serta pengamannya tidak memadai sehingga membuka peluang hilangnya bahan material tersebut akibat dicuri maupun terbenam dalam tanah. Temuan nomor tiga terjadi dikarenakan sejumlah 323 aset tanah belum dilakukan sertifikasi sehingga berpotensi hilang, tidak tercatat dan sengketa. Selain itu juga kebijakan kapitasi aset tetap belum dilaksanakan dan terdapat perbedaan pencatatan ruas jalan yang ada di KIB dengan jumlah yang sebenarnya. Temuan nomor 4 terjadi akibat kesalahan dalam perencanaan penganggaran pada dua dinas. Dimana pada perencanaan di sekretariat daerah masuk kedalam pos belanja pegawai yang seharusnya masuk kedalam belanja bantuan sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah senilai Rp. 3.408.000.000 dan di Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika yang mana pada perencanaan terdapat pos belanja modal sebesar Rp. 603.900.000 yang seharusnya masuk kedalam pos belanja barang yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat. Temuan kelima terjadi dikarenakan pendapatan retribusi pada dinas PUPR dari sewa alat berat milik pemerintah Kabupaten Serang senilai Rp.2.093.245.656 dilakukan oleh PUPR sendiri pada pekerjaan swakelola, yang mana pemerintah bukan subjek retribusi, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan (perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, dan BUMD).

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	HASIL TEMUAN
1	Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan senilai Rp.177.872.000
2	Belanja BBM, Gas, dan Pelumas pada sekretariat daerah tidak sesuai ketentuan senilai Rp.134.056.723
3	Pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp.35.949.994
4	Penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis senilai Rp.45.168.100
5	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan alun-alun tidak sesuai kontrak senilai Rp.645.204.278,45
6	Pelaksanaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp.1.667.139.829,10
7	Pemberian bantuan tidak terduga pemerintahn kabuapten Serang tidak sesuai ketentuan senilai Rp.168.000.000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh BPK RI, dapat dijelaskan bahwa temuan nomor satu adalah karena adanya pembayaran honorarium PPTK, Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang tidak sesuai dengan standar satuan harga (SSH) pada OPD Bappeda, Dinas PMD, Sekretariat Daerah, serta Bappeda dengan nilai total sekitar Rp.177.872.000. Temuan nomor dua dan nomor tiga adalah adanya dokumen pertanggungjawaban belanja BBM tidak benar senilai Rp.134.056.723 dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak benar senilai Rp.35.949.994. Temuan nomor 4 diketahui berdasarkan hasil uji petik pada tujuh sekolah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan juknis. Penggunaan dana BOS tersebut diantaranya untuk membiayai kegiatan MKKS, KKKS, MGMP, KKG, membeli bahan baku atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran, serta membiayai iuran dalam rangka upacara hari besar nasional, upacara atau acara keagamaan senilai Rp. 45.168.100. Temuan nomor lima dan nomor enam dikarenakan adanya pekerjaan fisik yang saat dilaksanakan uji petik ternyata tidak sesuai spesifikasi dengan nilai masing-masing Rp. 645.204.278,45 dan Rp. 1.667.139.829,10. Temuan nomor 7 terjadi karena adanya kesalahan pemberian Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang diberikan kepada yang tidak seharusnya menerima sebesar Rp. 168.000.000. Berdasarkan semua penemuan terdahulu tersebut dapat diketahui bahwasannya pemerintah punya pelaporan tentang uang sepenuhnya belum memenuhi syarat atau kriteria kualitatif laporan keuangan yang sudah dijadikan acuan syarat yakni dalam PP Np. 71 Th 2010, membahas SAP. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas keuangan pemerintah yang cukup menarik perhatian agar dapat dijadikan pembahasan dan melanjutkan penelitian yang mulanya adalah SDM, sistem pengendalian internal yang baik, sistem akuntansi keuangan daerah serta penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), hingga sampai melakukan pengawasan berkala terhadap laporan dari pemerintah daerah tentang keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut SAP Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 pada Miniawati (2016), tentang penyajian laporan keuangan paragraf sembilan bahwa, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas ialah sesuatu yang dapat diukur misalnya adalah hasil secara efektif dan efisien, dilakukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran sebuah organisasi atau perusahaan dengan baik dan memiliki nilai guna (Barusman, 2019). Menurut Kasmir (2017), laporan keuangan ialah laporan yang ditunjukkan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan atau organisasi saat ini, atau pada suatu periode tertentu. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah suatu hasil yang dapat diukur memiliki nilai guna yang bentuknya merupakan sebuah laporan.

Indikator Laporan Keuangan

Menurut Dunan & Lidya (2014), Laporan keuangan memiliki arti yakni komunikasi tentang informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan, supaya komunikasi tersebut berjalan efektif, informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik dasar yang didalamnya harus sudah mudah untuk dimengerti, kredibel, signifikan, tepat pada waktunya, konstan dan bisa dibandingkan. Berikut merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 (Barusman, 2019), yakni:

1. Relevan, laporan keuangan akan dikatakan relevan jika informasi yang terkait didalamnya dapat berpengaruh dengan keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam evaluasi peristiwa yang ada di waktu lalu atau terkini serta membuat prediksi untuk masa yang akan datang, lalu melakukan penegasan atau memeriksa hasil evaluasi pada waktu yang lalu. Dengan itu, informasi tentang laporan keuangan yang relevan bisa berhubungan dengan yang dimaksud oleh para pengguna.
2. Andal, artinya bebas dari definisis yang sesat dan salah material dalam sebuah laporan keuangan berupa informasi, disajikan secara jujur dan mudah terverifikasi. Informasi bisa saja signifikan, namun apabila hakikat dan penyajiannya tidak dapat terandalkan maka dalam menggunakan satu informasi dapat potensi untuk bisa terbilang sesat/ menyesatkan.
3. Informasi yang bisa menjadi bahan perbandingan, lebih memiliki kegunaan apabila bisa dilakukan perbandingan dengan laporan keuangan pada periode kemarin atau laporan lain secara umum. Melakukan perbandingan secara *intern* dan *extern*. Perbandingan dalam akan dilakukan jika satu entitas menerapkan bijak akuntansi sama setiap tahunnya. Sedangkan bandingan *extern* dapat dilakukan jika entitas yang dibandingkan penerapannya sama dengan tempat tersebut. Jika entitas pemerintahan melakukan penerapan bikak akuntansi yang lebih cakap daripada kebijakan akun yang sedang diterapkan maka perubahan itu akan terungkap di periode saat terjadi perubahan.

Penelitian ini mempergunakan survey sebagai metode pencarian data (Sugiyono, 2012), (Barusman, 2014). Metode survey merupakan saat melakukan penelitian besar atau kecil, namun data yang digunakan adalah data sampel dari populasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan regresi linier berganda yang artinya apakah pengaruhnya variabel bebas dengan variabel terikat, lalu melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji t dan uji f. Dalam penelitian ini subjek kurang dari 100 sehingga lebih baik untuk diambil semua, yaitu 2 orang pegawai pengolah keuangan kalikan 38 OPD artinya terdapat 76 orang pegawai yang akan dijadikan responden atau sebagai sampel. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian populasi yang meneliti seluruh anggota populasi.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
LKPD (Y)	76	26	43	35.74	.444	3.873
MSDM (X1)	76	28	43	36.14	.350	3.054
SAKD (X2)	76	27	50	37.32	.429	3.742
IT (X3)	76	26	43	36.14	.442	3.853
SPIP (X4)	76	26	50	36.75	.480	4.183
Valid N (listwise)	76					

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan nilai N, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*Mean*) dan standar deviasi dari keseluruhan variabel penelitian. Berdasarkan nilai rata-rata dapat diketahui gambaran secara umum masing-masing variabel dengan perbandingan nilai-rata-rata dengan skor.

Analisis Kuantitatif

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	46.301	7.387		6.268	.000
MSDM (X1)	.281	.150	.202	1.877	.066
SAKD (X2)	.136	.164	.125	0.828	.413
IT (X3)	.246	.126	.225	1.952	.054
SPIP (X4)	.126	.183	.107	0.687	.492

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5, diketahui hasil dari persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: $Y = 46,301 + 0,281X_1 + 0,136X_2 + 0,246X_3 + 0,126X_4 + E_i$

Berdasarkan output *Coefficients* di atas, diketahui yakni nilai dari regresi koefisien pada variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) adalah 0,281 bernilai positif (+), sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) adalah 0,136 bernilai positif (+), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) adalah 0,246 bernilai positif (+), dan sistem

pengendalian intern pemerintah (X₄) adalah 0,126 bernilai positif (+). Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas SDM (X₁), SAKD (X₂), PTI (X₃) dan SPIP (X₄) secara bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Serang. Pengaruh positif (+) artinya adalah tiap meningkatkan kualitas SDM (X₁), SAKD (X₂), PTI (X₃) dan SPIP (X₄) akan memberikan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Serang.

Hasil (Uji-t Statistik)

Targeting yang akan dibidik oleh Taman Kehati adalah petani/pekerja bebas, pegawai pemerintah dan buruh/karyawan swasta, dan pelajar. Hal ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki Taman Kehati.

Tabel 6. Hasil Uji-t Statistik

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1		
(Constant)	6.389	.000
MSDM (X1)	2.873	.002
SAKD (X2)	2.731	.002
IT (X3)	2.767	.000
SPIP (X4)	2.775	.004

a. Dependent Variable: LKPD (Y)

Sumber: data diolah, 2021

Hasil Uji-F Statistik

Tabel 7. Hasil Uji-F Statistik ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	11.076	4	2.769	3.693	.001 ^a
Residual	29.024	71	.409		
Total	40.100	75			

a. Predictors: (Constant), IT, SAKD, MSDM, SPIP
 b. Dependent Variable: LKPD (Y)

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat dari proses mengelola serta dari proses computer yakni dengan SPSS Versi 19.0, maka didapatkan Sig F 0.001 < 0.05 dengan F hitung (3,693) > F tabel (2,503). Ini artinya kualitas dari SDM (X₁), SAKD (X₂), PTI (X₃) dan SPIP (X₄) secara bersamaa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Serang. Oleh karena itu, hipotesis dapat dikatakan diterima atau dalam kata yang lain adalah (H_a) diterima dan (H_o) ditolak.

Hasil Koefisien Determinasi

Dalam hal koefisien Determinasi, untuk melihat adanya keeratan dalam hubungn satu dan lain variabel terikat dengan variabel bebas. Kata lainnya adalah uji koefisien determinasi berguna untuk mengetahui berapa besar variabel bebas mampu untuk menjelaskan variabel terikat. Hal ini nilai koefisien determinasi diketahui melalui nilai Adjusted R square, makin tinggi nilai tersebut maka model regresi yang digunakan adalah baik. Nilai r square kisaran 0-1 sehingga regresi linier berganda baiknya mempergunakan r square yang sudah sesuai atau tertulis Adjusted R square, karena sudah sesuai dengan jumlah variabel bebas yang digunakan. Berikut ini adalah hasil dari koefisien determinasi (R²) melauai alat SPSS versi 19.0.

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.472	.417	670.803

a. Predictors: (Constant), SPIP (X4), SAKD (X2), MSDM (X1), IT (X3)
b. Dependent Variable: LKPD (Y)

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 8 ini, angka R memperoleh sebesar 0,679. Hal ini artinya terdapat hubungan yang kuat diantara kualitas dari SDM (X1), SAKD (X2), PTI (X3) dan SPIP (X4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Oleh karena itu, angka R² (R Square) sebesar 0,472 atau (47,2%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase 47,2% adalah sumbangan dari variabel bebas X1 yang artinya sangat terdapat pengaruh terhadap variabel Y Sedangkan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serang.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serang.

Implikasi

Adapun implikasi dari hasil temuan ini yaitu :

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh paling dominan dibanding dengan tiga variable lainnya, tentu nya hasil perhitungan ini sangat logis mengingat secara keseluruhan dari variable tidak dapat berjalan efektif tanpa di dukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. hal ini berimplikasi bahwa pemerintah dalam penempatan aparatur pengelola laporan keuangan harus memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan yang dimiliki, mengingat saat ini masih ada 57,68% responden yang memiliki latar belakang pendidikan diluar akuntansi dan keuangan. Dengan kesesuaian latar belakang yang dimiliki tentunya aparatur tersebut lebih memahami alur penyusunan laporan keuangan yang benar.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai prosedur akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Untuk memitigasi kesalahan prosedur dalam penerapan system maka perlu dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan system akuntansi keuangan daerah secara berkala untuk memastikan para aparatur pengelola keuangan memiliki pengetahuan dan informasi terbaru.
3. Kepada aparatur pengelola keuangan pemerintah kabupaten Serang untuk selalu melakukan perawatan terhadap perangkat teknologi informasi seperti komputer dan membuat jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
4. Berdasarkan olah data hasil kuisioner dengan menggunakan regresi linier berganda diketahui system pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh paling rendah dibanding variable lainnya, padahal pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian internal ini seharusnya tidak saja dilakukan oleh atasan langsung ataupun pimpinan, tetapi akan lebih efektif jika melibatkan Inspektorat Kabupaten Serang

sehingga kegiatan pengawasan lebih sistematis demi terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serang yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Barusman, Andala Rama Putra., & Mihdar, Fauzi. (2014). *The effect of job satisfaction and organizational justice on organizational citizenship behavior with organization commitment as the moderator. International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9), 118-126. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(9), 118–126.
- Barusman, Andala Rama Putra. (2019). *The effect of security, service quality, operations and information management, reliability & trustworthiness on e-loyalty moderated by customer satisfaction on the online shopping website. International Journal of Supply Chain Management* (Vol. 8, Issue 6, pp. 586–594).
- Barusman, Tina Miniawati., & Pratiwi, Tia Rizna. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten Periode 2013-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Dunan, Hendri., & Liyana. (2014). Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tarahan Tahun 2007-2011. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol, 5, No; 1.
- Barusman, Tina Miniawati. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Banten Periode 2013-2015, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Banten.
- Nilwan. (2016). Implementasi Transparansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Untuk Meminimalisasi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Banten*.
- Nordiawan. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Detail
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta